

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.<sup>1</sup>

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan yang membuat keadaan sekarang diharapkan akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Pembangunan nasional atau pembangunan daerah pun memiliki hakekat yang sama yakni perubahan secara terus-menerus pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut dilakukan guna mencapai peningkatan taraf hidup serta mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual. Oleh sebab itu, semua kebijakan akan terus diarahkan dan diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan merata sesuai dengan UUD 1945.

Namun demikian, masih banyak penduduk yang pendapatannya hanya sedikit sekali di atas batas garis kemiskinan. Kelompok nyaris miskin ini sangat rawan terhadap perubahan-perubahan keadaan

---

<sup>1</sup>Apriliyah S. Napitupulu, *Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatra Utara*, (Skripsi: Universitas Sumatra Utara, Juni, 2007), 16.

ekonomi, seperti kenaikan harga komoditi-komoditi utama atau turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu masalah kemiskinan ini masih tetap perlu diperhatikan secara serius karena tujuan pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>2</sup>

Permasalahan kemiskinan dalam pembangunan sangat sering dijumpai di hampir seluruh negara di dunia. Permasalahan yang terjadi pun memiliki karakteristik yang hampir sama di mana kemiskinan yang tinggi terjadi di sebuah wilayah pedesaan atau di sebuah wilayah yang memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Secara sederhana, kemiskinan (absolut) dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan sejumlah penduduk untuk hidup di atas garis kemiskinan atau batas kemiskinan yang ditetapkan berdasar kategori tertentu.<sup>3</sup>

Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun, belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan ini dalam satu definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi hingga perspektif moralitas. Terlepas dari pro kontra dan perdebatan mengenai konsep kemiskinan, namun isu kemiskinan tetap menjadi isu yang sangat penting karena di antara tujuan utama pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengentaskan

---

<sup>2</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Gunadarma, 2010), 154.

<sup>3</sup> Tri Widodo, *Perencanaan Pembangunan: (Aplikasi Komputer) Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YOGYAKARTA, 2006), 7.

kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin.<sup>4</sup>

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.<sup>5</sup>

Bank Dunia lewat laporannya *World Development Report on Poverty* mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front: (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin; (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi; (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka di antara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan

---

<sup>4</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 68.

<sup>5</sup> Lucky Selvanda Ariyus. "Analisis Angka Harapan Hidup, PDRB per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten", Skripsi Undip, (Agustus-September, 2015), 12.

SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.<sup>6</sup>

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, *United Nation Development Programme* (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) serta kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.<sup>7</sup>

Perkembangan capaian pembangunan manusia di Banten terus mengalami peningkatan. Hal ini, dapat diketahui dari naiknya angka

---

<sup>6</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Bogor: Galia Indonesia, 2014), 215-216.

<sup>7</sup> Devianti Patta, "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010*" (Skripsi: Universitas Hasanudin, 2011), 2-3.

IPM secara konsisten selama periode 2011-2016. Adapun besaran kenaikannya senilai 2,74 poin, yang setara dengan 0,47 poin per tahun.

Angka IPM Banten pada tahun 2016 mencapai 70,96. Berarti, tingkat pencapaian pembangunan manusianya dapat dikatakan masih sekitar 71 persen dari kondisi pembangunan manusia yang ideal (IPM ideal = 100).

Namun demikian capaian sebesar itu, Banten menempati urutan kedelapan di Indonesia dalam hal pembangunan manusia. Hanya saja, status pembangunan manusianya belum mengalami kenaikan, yakni masih berada pada kategori “Tinggi” ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Banten sendiri mulai menempati status pembangunan manusia kategori “Tinggi” sejak tahun 2015, setelah sebelumnya berada pada kategori “Sedang” ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ).

Berdasarkan permasalahan tersebut membuat penulis untuk mengkaji lebih dalam yang dituangkan dalam judul skripsi:

**“PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2011-2016.”**

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari luasnya pokok bahasan, penulis membatasi masalah hanya pada Indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga mengetahui bagaimana Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, dan mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2011-2016.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten 2011-2016?
2. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten 2011-2016?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten 2011-2016.
2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten 2011-2016.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademik

Dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan.

2. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan.

### 3. Bagi Universitas Islam Negeri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan keustakaan dan bahan rujukan untuk penyusunan skripsi di masa yang akan datang.

### 4. Bagi Provinsi Banten

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pilihan strategi pengambilan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan dan perencanaan pembangunan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Ukuran kemiskinan yang umum digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan di suatu daerah adalah persentase penduduk miskin. Persentase penduduk sendiri adalah persentase penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Walaupun demikian, kemiskinan sesungguhnya memiliki banyak dimensi selain dimensi pendapatan. Dimensi lain kemiskinan, dapat dilihat dari peluang untuk memperoleh kesehatan dan umur yang panjang, peluang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain. Intinya adalah kemiskinan sangat terkait dengan sempitnya kesempatan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihan hidup.

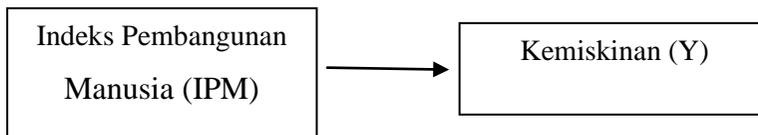
Bila kemiskinan berkaitan erat dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan,

pendidikan dan kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik, idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah.<sup>8</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menyatakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten menduduki posisi terendah kelima secara nasional. Hal ini merupakan masalah pokok yang harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan teori kemiskinan dipengaruhi oleh satu indikator yang kemudian dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten sebagai variabel terikat. Berdasarkan teori tersebut diatas, maka peneliti menentukan kerangka berfikir sebagai berikut:

### Gambar 1.1

#### Kerangka Berfikir



Keterangan:

#### 1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka

---

<sup>8</sup> Dharmaputra, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2016*, (Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2016), 65.

kemiskinan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Peningkatan kualitas dan perluasan ruang lingkup dan pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin.<sup>9</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk penyusunan penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok yang kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu pemikiran. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang permasalahan yang ada, dan tujuan diadakannya penelitian.

BAB II Landasan Teori, berisikan dasar-dasar dan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu dengan topik permasalahan yang sama. Dalam bab ini dimuat kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, berisikan penguraian mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, berisikan penguraian mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

---

<sup>9</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 307.

BAB V Kesimpulan dan Saran, berisikan kesimpulan tentang hasil analisis yang telah dilakukan beserta pembahasannya, dan saran yang dapat diberikan kepada pembaca dan peneliti selanjutnya.